

# LAPORAN

# 2019



## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
Jalan Jendral Sudirman KM 6,8 Sampit - Kalimantan Tengah Kode Pos 74322  
Telefon / Fax (0531) 25250

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyadari kian besarnya tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun LKIP Tahun Anggaran 2019 yang juga sebagai akumulasi pembulatan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 tetap mengacu kebijakan yang telah digariskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan pelaksanaan kinerja periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja yang menggambarkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Realisasi pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No	SASARAN	DIDUKUNG JUMLAH PROGRAM	REALISASI
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	2	100 %
2	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	2	80,91 %
3	Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	1	100 %
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>93,63 %</b>

### 1. Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana

Capaian sasaran strategis Tahun 2019 ditunjukkan dengan Indikator Kinerja yaitu Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk di dukung oleh 2 (dua) program dengan capaian rata-rata sebesar **100 %**. Sedangkan jumlah anggaran untuk kegiatan yang terkait dalam Sasaran Strategis ini pada Tahun 2019 sebesar **Rp. 5.059.326.400,-** atau **34,05 %** dari total anggaran seluruhnya dengan realisasi

**Rp. 4.741.348.949,- atau 93,71 %**, dapat disimpulkan bahwa program ini telah dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai pertahun. Keberhasilan dapat dilihat dengan terbentuknya 2 (dua) desa tangguh bencana di Tahun 2019.

## **2. Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif**

Capaian sasaran strategis Tahun 2019 ditunjukkan dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana. Realisasi kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai **80,91 %**. Angka ini menunjukkan bahwa dari 262 kejadian bencana yang terjadi, 212 kejadian dapat ditangani sesuai waktu tanggap (responsive time rate) dan 50 kejadian yang tidak dapat ditangani. Walaupun tidak mencapai target, tapi sudah menunjukkan penanganan bencana cukup baik dan diharapkan untuk tahun selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif yaitu sebesar **Rp. 6.067.663.400,- atau 40,84 %** dari total anggaran seluruhnya dengan realisasi anggaran **Rp. Rp. 4.457.649.378,- atau 73,46 %**.

## **3. Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana**

Capaian sasaran strategis ini ditunjukan dengan indikator kinerja Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana dan dukung oleh 1 (satu ) program yaitu Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar **100 %** yang berarti sasaran ini berhasil dilaksanakan. Sedangkan jumlah anggaran untuk kegiatan yang terkait dalam Sasaran ini sebesar **Rp. 214.000.000,- atau 1,44 %** dari total anggaran seluruhnya dengan realisasi sebesar **Rp. 211.506.000,- atau 98,83 %**.

Dari pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat disimpulkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur **memuaskan** dalam mencapai target kinerja dengan memanfaatkan alokasi sumber daya yang disediakan secara optimal dengan nilai hasil pengukuran kinerja sebesar **93,63 %**. Hal tersebut merupakan wujud dari komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Sebagai penutup, diharapkan LKIP ini dapat mengukur hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya lah **Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019** dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 berdasarkan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan memperhatikan Permenpan & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berakhirnya implementasi Program dan Kegiatan tahun Anggaran 2019 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disampaikan berdasarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2019 diharapkan memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan stakeholders sehingga ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, Januari 2020

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Ir. M. YUSUF, MT  
Nip. 19640914 199603 1 003**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Dasar Pembentukan dan Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur	1
1.2 Uraian Tugas dan Fungsi	3
1.3 Tugas Pokok	29
1.4 Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi	56
1.6 Sistematika Penyajian	62
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis BPBD	64
2.2 Rencana Kinerja	71
2.3 Perjanjian Kinerja 2018	74
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja	75
3.2 Analisis Anggaran	92
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	95

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 1.2	Data Beberapa Sungai Besar di Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 1.3	Luas Tutupan Lahan Tahun 2013
Tabel 1.4	Data Potensi Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Data Kajian Resiko Bencana Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020
Tabel 1.5	Pemetaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Periode Juli sampai dengan Oktober 2019)
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 1.7	Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel 1.8	Anggaran Perprogram dan Perbelanja
Tabel 2.1	Uraian Tujuan dan Indikator Tujuan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
Tabel 2.2	Uraian Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
Tabel 2.3	Formulasi Indikator Sasaran Strategis
Tabel 2.4	Sumber Data Perhitungan Indikator Sasaran
Tabel 2.5	Program untuk pencapaian sasaran
Tabel 2.6	Alokasi per sasaran pembangunan Tahun 2019
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran 1
Tabel 3.2	Pencapaian Sasaran 2
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran 3
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2019
Tabel 3.5	Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dan 2019
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra 2016-2021
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis dan Program Pendukung Tahun 2019



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pembentukan dan Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan sesuai Peraturan Bupati Kotim no. 44 tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas :

1. Kepala BPBD

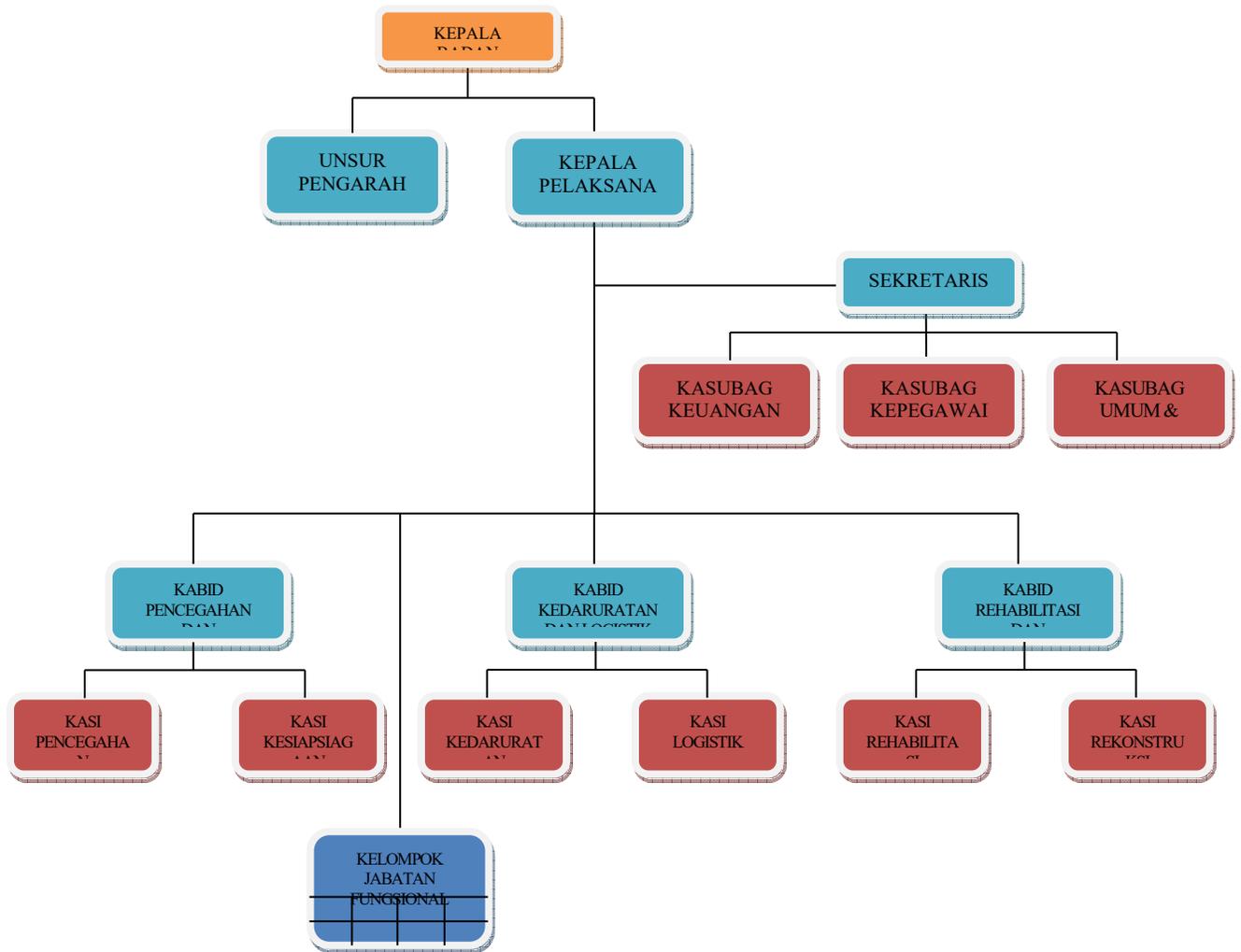
Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan anggota

3. Unsur Pelaksana
  - Kepala Pelaksana
  - Sekretariat Unsur Pelaksana
  - Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Seksi Kedaruratan dan Logistik
  - Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



### 1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulanga Bencana Daerah mempunyai tugas pokok memimpin mengarahkan, membina, mengevaluasi, mengoordinasikan,

mengatur dan mengawasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengekoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Penyusunan pedoman kerja dan petunjuk teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pengawasan dan pembinaan pelaksana tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Pengevaluasian program kerja dan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Penyampaian saran dan pertimbangan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- b. Mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Mengawasi dan membina pelaksanaan kebijakan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Mengevaluasi program kerja dan pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan serta tugas - tugas lain dengan SKPD/unit kerja lain yang terkait; dan
- g. Mmenyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan serta tugas -tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan tugas-tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Propinsi.

## **2. Unsur Pengarah**

Unsur Pengarahan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Unsur Pengarahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pemantauan dan pengevaluasian peyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, unsur Pengarahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana
- b. memantau dan mengidentifikasi daerah/lokasi rentan terkena gempa;
- c. memantau daerah/lokasi rentan terkena gempa;
- d. mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menganalisa cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **3. Kepala Pelaksana**

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi

dalam penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana , saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan dan program kerja penanggulangan bencana daerah secara terpadu, adil dan merata;
- b. penetapan target kinerja Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pelayanan masyarakat bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
- e. pengomandoan pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana;
- f. pelaksanaan penanggulangan bencana serta terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan staf dan pengelola anggaran Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan dan program kerja Penanggulangan Bencana Daerah secara terpadu, adil dan merata;

- b. menetapkan target kinerja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah , lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
- d. mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat kerja lainnya ,instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- e. melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengoptimalkan kinerja dan target dalam Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran badan dan pembinaan kinerja staf dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan

#### **4. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan tugas pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, perencanaan, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- b. pengelolaan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/perbekalan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan Organisasi Badan;
- g. penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan ; dan
- h. pengoordinasian pembinaan , monitoring, evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan, merencanakan, rencana kegiatan program kerja dan anggaran Badan;
- b. melaksanakan kegiatan kesekretariatan mengacu program kerja yang sudah ditetapkan;
- c. mengelola urusan tatausaha , surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/ perlengkapan,hukum dan hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- e. mengevaluasi kinerja kegiatan kesekretariatan terkait pelayanan kepegawaian keuangan, ketatausahaan , aset dan urusan umum;
- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana ,aset kekayaan Badan;
- g. membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. memberikan masukan dan saran kepada pemimpin terkait tugas-tugas kesekretariatan;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan di bidang kesekretariatan;

- j. memberikan penilaian terhadap kinerja staf; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat, membawahi;

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Kepegawaian

#### **4.1 Sub Bagian Umum dan Perencanaan**

Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas pokok pelayanan dan pengelolaan urusan umum ,rumah tangga kantor, pengelolaan perlengkapan dan perbekalan penyiapan pelaksanaan koordinasi perencanaan, penyusunan perencanaan program dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Umum dan Perencanaan;
- b. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional di bidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan;
- c. penyiapan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan pelayanan administrasi surat menyurat;
- e. penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip serta menyimpan proses penyusutan arsip dan dokumen;
- f. penyiapan data basis program untuk menyusun rencana kegiatan di bidang Umum dan Perencanaan;
- g. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran ;
- h. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan ; dan

- i. pembinaan, pengendalian , monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan-bahan dan data basis program untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bagian Umum Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan konsep-konsep petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penyusunan anggaran;
- c. menghimpun, mengklasifikasi dan mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran serta melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah penyusunan perencanaan anggaran (menyusun / membuat renstra);
- e. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan, pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
- f. menyiapkan bahan-bahan dan data basis pelaksanaan untuk perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- g. menyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya;
- h. menyiapkan pelayanan administrasi pelaksanaan perjalanan Dinas dan data basis untuk menyusun rencana kegiatan;
- i. menyiapkan bahan-bahan sarana perlengkapan, jadwal tugas jaga dan petugas keamanan kantor termasuk pelayanan pengamanan pengambilan uang dari bank;

- j. menyiapkan pelayanan penerimaan tamu;
- k. menyiapkan bahan-bahan sarana perlengkapan dan fasilitas lainnya untuk upacara-upacara dan pertemuan;
- l. menyiapkan pelayanan operasional, perbaikan dan pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan kendaraan Dinas termasuk pengurusan surat-surat kendaraan Dinas;
- m. melakukan inventarisasi barang-barang kekayaan Negara;
- n. melakukan pemantauan arsip-arsip aktif dan inaktif;
- o. melakukan penyimpanan, penata usahaan dan pemeliharaan arsip-arsip inaktif meliputi penerimaan dan distribusi surat-surat masuk, pemberian nomor surat, pengagendaan dan penerimaan surat keluar, penggandaan, file surat-surat dan dokumentasi, telepon, telek dan faksimile serta menyimpan dan penyaluran perlengkapan perbekalan program kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. memberikan bimbingan teknis kepada semua pihak terkait dan melakukan penilaian prestasi kerja para staf yang di bawahinya agar kinerja mereka meningkat;
- q. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif maupun represif agar tujuan pengelolaan Sub Bagian Umum dan perencanaan tercapai secara efektif dan efisien ; dan
- r. menyampaikan laporan kepada sekretaris mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan ; dan
- s. melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk sekretaris.

#### **4.2 Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pengelolaan ,pengendalian keuangan, analisis, realisasi, pembukuan, administrasi keuangan, pembinaan bandaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. menghimpun bahan dan data pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
- c. penghimpun petunjuk teknis di bidang pelaksanaan anggaran , pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
- d. penghimpunan, pengklarifikasian serta mengolah data dan bahan analisis pelaksanaan anggaran , pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bendaharawan ; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
- b. menyediakan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
- c. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan operasional di bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran , pembukuan perbendaharaan dan verifikasi;
- d. menghimpun dan mengklarifikasikan serta mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran , pembukuan dan perbendaharaan;
- e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penyusunan anggaran;
- f. menyiapkan bahan untuk usulan pengelolaan barang dan anggaran serta pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa;

- g. menghimpun mengklasifikasi dan melakukan tela'ahan pelaksanaan anggaran;
- h. melakukan pemantauan masalah-masalah dalam pelaksanaan anggaran;
- i. melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
- j. menyiapkan pertemuan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
- k. menyiapkan pelayanan pembayaran gaji, lembur dan penghasilan lainnya;
- l. mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
- m. melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus, preventif maupun represif agar tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai secara efektif dan efisien ;
- n. memberikan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan melakukan penilaian prestasi kerja para staf yang dibawahnya agar kinerja mereka semakin meningkat;
- o. menyampaikan laporan kepada sekretaris mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
- p. melaksanakan tugas pekerjaan lainnya sesuai dengan petunjuk sekretaris.

#### **4.3 Sub Bagian Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan pegawai, administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, analisis jabatan dan menghimpun ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan sub dan pemutakhiran data pegawai ,perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier , peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan penyiapan punakarya (pension);
- b. pembinaan dan pengembangan karier serta penilaian rangka kredit dan fungsional;
- c. penghimpunan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- d. penghimpunan ketentuan perundang-undangan dan produk hukum di bidang kepegawaian;
- e. penganalisaan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- f. pembinaan , pengendalian ,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai urain tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan data basis program untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran bulanan , triwulan dan tahunan Sub Bagian Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan konsep-konsep petunjuk teknis operasional di bidang pelaksanaan pengelolaan pembinaan dan kepegawaian;
- c. memberikan petunjuk upaya penyelesaian masalah-masalah administrasi kepegawaian ;

- d. memberikan bimbingan teknis kepada semua pihak terkait, dan melakukan penilaian prestasi kerja kepada staf yang dibawahinya agar kinerja mereka meningkat;
- e. mengidentifikasi antara pegawai yang menjabat jabatan fungsional dan jabatan struktural;
- f. menyiapkan bahan, analisis, evaluasi dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional ;
- g. melakukan pemantauan dan tela'ahan masalah-masalah dalam dalam pelaksanaan penela'ahan hukum, perundang-undangan , organisasi dan ketatalaksanaan ;
- h. melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepegawaian organisasi ketatalaksanaan;
- i. melakukan pemantauan dan tela'ahan masalah-masalah dalam pelaksanaan pengelolaan pembinaan kepegawaian serta melaporkan hasil pemantauan dan tela'ahan tersebut dalam format yang berlaku;
- j. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus, prefentif, refresif agar tujuan Sub Bagian Kepegawaian tercapai secara efektif dan efisien;
- k. mengatur dan mengidentifikasi dalam pengusulan pendistribusian pegawai;
- l. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah hukum, pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan ;
- n. melaksanakan urusan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- o. melakukan pelayanan ketata usahaan pegawai;
- p. menyiapkan bahan-bahan untuk pengusulan mutasi pegawai;

- q. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin ;
- s. menyiapkan bahan-bahan data dan basis pelaksanaan untuk pengusulan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemberian penghargaan kepada pegawai;
- t. menyiapkan daftar monitoring /penjagaan kenaikan pangkat dan berkala;
- u. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan kebijakan operasional di bidang kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan perbekalan meliputi : pengelolaan dan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier , peningkatan kesejahteraan, dokumentasi pemberian penghargaan, penyiapan punakarya (pensiun);
- v. menyampaikan laporan kepada sekretaris mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan ; dan
- w. melaksanakan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk sekretaris.

## **5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan maupun tugas pokok membantu Kepala pelaksanaan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja dan kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- d. pemberian pelayanan administrasi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan program kerja pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. merumuskan di bidang pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dengan pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya Pencegahan Bencana;
- d. melaksanakan analisis, penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana dan pengembangan prosedur Penanggulangan Bencana;
- e. melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dikawasan rawan bencana melalui gladi lapangan , simulasi, wajib latih dan sosialisasi penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
- f. melakukan peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- g. memberikan pelayanan pemadaman kebakaran;

- h. melaksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. membina dan menilai kinerja staf terkait tugas-tugas yang diberikan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , membawahi :

- 1. Seksi Pencegahan
- 2. Seksi Kesiapsiagaan

### **5.1 Seksi Pencegahan**

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok memantau dan menyiapkan data-data dan bahan berkaitan dengan sumber bahan dan ancaman bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pencegahan program kerja dan kegiatan pada Seksi Pencegahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana;
- c. pelaksana koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan bencana ;
- d. penyiapan data dan bahan terkait pencegahan bencana;
- e. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penggunaan teknologi terkait dengan pencegahan bencana;
- f. mengevakuasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pencegahan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan program kerja pada Seksi Pencegahan;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana;
- d. menyiapkan bahan dan data serta melaksanakan analisis , penyusunan, penetapan dan penginformasian pada rawan bencana dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- f. melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan prabencana ;
- g. membina dan menilai kinerja staf terkait tugas-tugas yang diberikan ; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5.2. Seksi Kesiapsiagaan**

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana, penyuluhan , pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta pemutakhiran prosedur tanggap darurat bencana dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan dan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran.

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja dan kegiatan pada Seksi Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan pada perumusan kebijakan teknis pada kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pihak lembaga yang terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- d. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat dan penanganan kebakaran;
- e. pengevaluasiandan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesiapsiagaan ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan program kerja pada Seksi Kesiapsiagaan;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Kesiapsiagaan pada prabencana dan penanganan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan dan data seta analisis dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengujian sistem peringatan dini terhadap bencana;
- e. melaksanakan koordinasi hubungan dengan instansi atau pihak lembaga terkait dalam kesiapsiagaan dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana;

- f. melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dikawasan rawan bencana melalui gladi lapangan, simulasi, wajib latihan dan sosialisasi penanggulangan bencana da penanganan kebakaran;
- g. melakukan upaya peningkatan peran serta kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- h. memberikan pelayanan pemadam kebakaran;
- i. melakukan pemantauan , evaluasi dan laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. membina dan menilai kinerja staf terkait tugas-tugas yang diberikan ; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
- a. pengoordinasian dan pelaksanaan tanggap darurat, pananganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- b. pengomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- c. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan tanggap darurat , penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
- b. melaksanakan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat , penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- d. melakukan analisis kebutuhan, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis tentang kebutuhan dasar logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- f. menginventarisasi data dan informasi terkait tugas- tugas bidang kedaruratan dan logistik ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:

- 1. Seksi Kedaruratan
- 2. Seksi Logistik

### **6.1 Seksi Kedaruratan**

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok penyiapan data, bahan dan sumber daya dalam menentukan status kendaraan darurat

bencana, penyiapan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- b. pengoordinasian dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;
- c. pengomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. penentuan status keadaan darurat bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- b. melaksanakan program kerja pada Seksi Kedaruratan ;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat bencana;
- d. melakukan analisis dan penyiapan data-data dalam menentukan status kendaraan darurat bencana;
- e. melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
- f. melakukan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau pihak lembaga terkait pada saat tanggap darurat bencana;
- g. melakukan analisis kebutuhan sumber daya pada saat tanggap darurat bencana;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6.2 Seksi Logistik**

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan terkait dengan pengadaan , penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik peralatannya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya;
- b. penyiapan data-data dan analisis dalam melakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik;
- c. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan ,pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- d. penyelenggraan analisis kebutuhan , pemantauan dan distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang , pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya;
- b. melakukan program kerja pada Seksi Logistik;
- c. melakukan pengadaan dan/atau penerimaan logistik dan peralatan , penggudangan dan penyimpanan, pendistribusian dan pengangkutan logistik unyuk memenuhi kebutuhan dasar terdiri dari sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannya;

- d. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal dukungan logistik, sarana dan prasarana;
- e. melakukan analisa dan penyiapan data-data untuk analisis kebutuhan penyaluran distribusi logistik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Kepala Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehalibitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja pada Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi pasca bencana;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian program/pemulihan perbaikan dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik pasca bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d. pemberian pelayanan administrasi Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi;
- e. pelayanan evaluasi dan monitoring pelaksanaan petugas Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi ; dan
- f. pelaksanaan petugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja terkait dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan Rehalibitasi dan Rekonstruksi pasca bencana;
- d. melakukan Rehalibitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, Rehalibitasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. melakukan Rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;
- f. melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehalibitasi dan Rekonstruksi , membawahi :

1. Seksi Rehalibitasi
2. Seksi Rekonstruksi

#### **7.1 Seksi Rehabilitasi**

Kepala Seksi Rehalibitasi mempunyai tugas pokok melakukan Rehalibitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana,

perbaikan sarana dan prasarana umum , pemulihan sosialisasi psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja pada Seksi Rehabilitasi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi pasca bencana;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian program / pemulihan perbaikan dan dengan saran utama pemerintah dan pelayanan publik pasca bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan Rehabilitasi dan pasca bencana;
- d. melakukan Rehabilitasi melakukan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, Rekonsiliasi dan resolusi konflik,

- pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7.2 Seksi Rekonstruksi**

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukan Rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja pada Seksi Rekonstruksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rekonstruksi pasca bencana;
- c. pengoordinasian dalam pelaksanaan program Rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Bidang Rekonstruksi pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja Seksi Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan Rekonstruksi pada pasca bencana;
- d. melakukan Rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangun kembali sarana dan prasarana , sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi pada pasca bencana; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.3. Tugas Pokok**

#### **1. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang telah dibentuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, sebagai lembaga teknis daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan program partisipasi dan penanggulangan bencana
2. Penyusunan protap penanggulangan bencana

3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan
5. Perencanaan ,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
6. Pelaksanaan program Rehalibitasi dan Rekonstruksi penanggulanagan pasca bencana;
7. Pelaksanaan kegiatan tatausaha badan ; dan
8. Pengoptimalisasian kinerja badan mencapai visi dan misi Kabupaten;  
Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. Mitigasi pencegahan bencana;  
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten.
- b. Penanganan bencana;  
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala Kabupaten.
- c. Penanganan pasca bencana;  
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Kabupaten.
- d. Kelembagaan;  
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Kabupaten .
- e. Penanganan Kebakaran;

Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kabupaten.

## **2. Kondisi Kebencanaan**

### **2.1 Gambaran Wilayah**

#### **2.1.1 Letak Geografis dan Batas Adiministrasi**

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan satu dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 112° 4' 3"-113° 16' 11" Bujur Timur dan 1° 11' 35"-3° 18' 8" Lintang Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.679.600 ha. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Sedangkan luas wilayah fungsi berdasarkan perencanaan pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 1.554.584,6 ha. Adapun batas-batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Katingan;

Sebelah Timur : Kabupaten Katingan;

Sebelah Selatan : Laut Jawa;

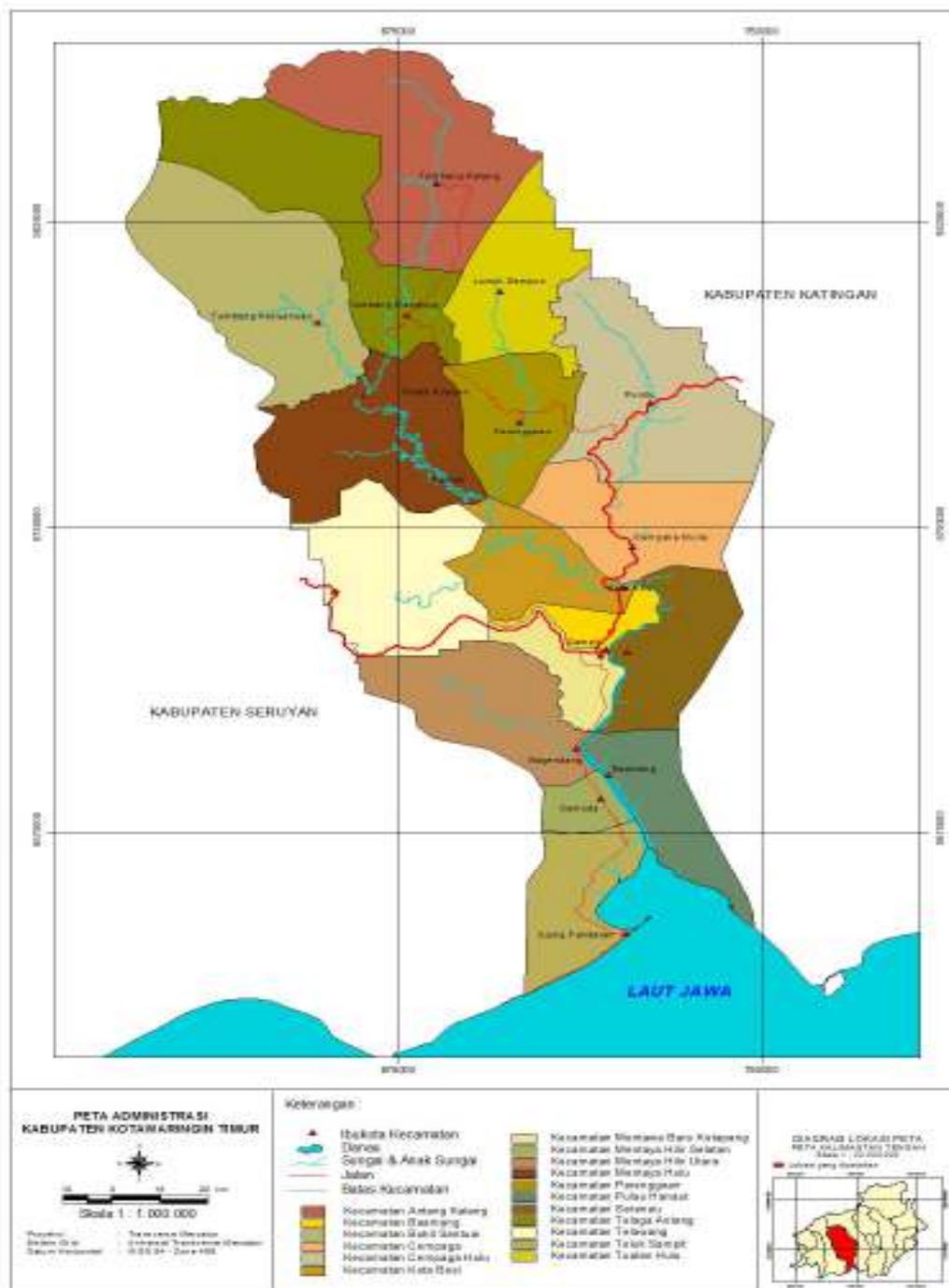
Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan.

Sejak tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi atas 17 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten**  
**Kotawaringin Timur**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas (Km2)</b>	<b>Luas Berdasarkan Pemanfaatan Ruang (Ha)</b>
1	Mentaya Hilir Selatan	Samuda	10	318,00	21.058,1
2	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	6	610,00	66.449,4
3	Pulau Hanaut	Bapinang	14	620,00	62.515,6
4	Mentaya Hilir Utara	Bagendang	7	725,00	96.443,7
5	Mtw. Baru Ketapang	Ketapang	11	726,00	34.900,3
6	Baamang	Baamang	6	639,00	20.640,7
7	Seranau	Mentaya Seberang	6	548,00	71.115,8
8	Kota Besi	Kota Besi	11	1.889,00	63.581,2
9	Cempaga	Cempaka Mulia	8	1.253,00	88.297,1
10	Cempaga Hulu	Pundu	11	1.183,00	151.045,9
11	Parenggean	Parenggean	15	493,15	71.147,1
12	Mentaya Hulu	Kuala Kuayan	16	1.712,79	131.926,2
13	Antang Kalang	Tumbang Kalang	15	1.579,00	160.402,4
14	Bukit Santuai	Tb. Penyahuan	14	1.636,00	168.005,1
15	Telawang	Sebabi	6	317,00	116.412,3
16	Telaga Antang	Tumbang Mangkup	18	1.456,21	146.133,1
17	Tualan Hulu	Luwuk Sampun	11	1.090,85	84.510,8
	<b>Luas Total</b>		<b>185</b>	<b>16.796,00</b>	<b>1.554.584,6</b>

**Sumber: KDA (BPS, 2017)**



### 2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, dapat dibagi dalam lima kelompok lereng yaitu 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, dan > 40%. Wilayah Selatan didominasi oleh kemiringan lereng 0-2%, wilayah tengah didominasi kemiringan 2-5%, sedangkan wilayah Utara didominasi kemiringan lereng 5-15% dan 15-40%. Umumnya pembagian lini topografi di kelompokkan dalam dua zona, yaitu :

- Wilayah Selatan dan Tengah dengan ketinggian tempat 0-100 m-dpl.
- Wilayah Utara dengan ketinggian tempat bervariasi antara 0-1000 m-dpl, tempat tertinggi terdapat di Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Telaga Antang, dan Kecamatan Bukit Santuai

Daerah ini merupakan wilayah berbukit hingga pegunungan yang terdiri dari batuan intrusi masam terdapat di Bagian Utara, sedangkan Bagian Tengah sampai Selatan didominasi oleh dataran rendah. Dataran Bagian Tengah terdiri dari dome gambut serta dataran rendah endapan sungai (*fluvial*) serta backswamp atau rawa belakang di sepanjang aliran sungai. Di bagian selatan, dataran rendah didominasi oleh dataran rendah endapan pantai (*fluviomarine*) dan pesisir pantai.

### 2.1.3 Fisiografi

Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah Fisiografis, yaitu:

#### 1. Dataran rendah, endapan pantai

Wilayah ini terdapat di tepi pantai, tepatnya pantai yang berbatasan dengan Laut Jawa, yang berjarak 2-5 km dari pantai. Dataran ini terbentuk dari hasil pengendapan pantai, yang berupa tanah kering atau sedikit tergenang dan memiliki tekstur kasar.

## 2. Dataran rendah, endapan sungai

Wilayah ini terdapat di tepian sungai yang berbelok-belok (*meander*) atau danau kecil. Letaknya agak tinggi, namun kadang-kadang tergenang dan banjir akibat limpahan air sungai. Dataran ini bertekstur tanah sedang sampai halus. Seluruh wilayah dataran rendah, baik yang berupa endapan sungai maupun endapan pantai, masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

## 3. Lahan gambut

Wilayah ini terletak di belakang wilayah endapan sungai (*levee*), yang terbentuk akibat hutan rawa monoton telah mencapai kromaks, sehingga terbentuk gambut yang cembung (*dome*).

## 4. Dataran rendah, batuan endapan pantai

Wilayah ini terletak agak ke hilir/tengah, terutama di sekitar Sungai Mentaya. Dataran ini membentang dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya terus ke timur. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.

## 5. Pegunungan/perbukitan batuan intrusi masam

Wilayah ini merupakan daerah patahan (*told*) dan lipatan (*fault*), terdapat di bagian hulu. Bentuk wilayah ini berbukit dan bergunung, yang didominasi oleh batuan endapan pasir dan liat dan diselingi dengan batuan intrusi yang umumnya masam.

## 6. Delta/Pulau

Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.

## 7. Lain-lain

Bagian yang termasuk lain-lain adalah tubuh air, diantaranya danau dan rawa, yaitu merupakan depresi atau cekungan yang airnya masih dalam.

Pada daerah ini belum sempat terbentuk gambut.

Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh pegunungan/ perbukitan intrusi masam dan dataran rendah batuan pantai. Pegunungan atau perbukitan

terdapat pada bagian Utara wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pegunungan/perbukitan tersebut terdiri dari batuan intrusi dan endapan masam,

sehingga memiliki kendala dalam pembudidayaan lahan.

Dataran rendah endapan pantai banyak ditemui pada bagian tengah dan pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain dataran rendah dengan batuan pantai, pada bagian tengah Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki kondisi fisiografis yang terdiri dari dome gambut, serta dataran rendah endapan sungai dan *backswamps* di sepanjang aliran sungai. Sedangkan pada bagian Selatan, fisiografis wilayahnya merupakan *dome* gambut dan dataran rendah endapan sungai. Pada bagian pesisir fisiografis wilayahnya terdiri dari dataran rendah endapan pantai. Kendala yang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam membangun saluran air, dimana air sulit mengalir keluar serta kadang-kadang tergenang dan banjir.

### 2.1.4 Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schmidt dan Ferguson) dengan kelembaban nisbi berkisar antara 82%-89% dan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 27°C-36°C. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan

kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm/tahun.

### **2.1.5 Geologi**

Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh lima jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya, Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi masing-masing formasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Formasi Dahor dapat ditemui di sebagian besar selatan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya pada bagian belakang disepanjang Daerah Aliran Sungai Mentaya. Satuan batuan (satuan *litologi*) penyusun formasi Dahor ini terdiri dari konglomerat dengan komponen fragmen kuarsif dan basal berselingan dengan batu pasir, batu lempung. Umur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah sampai Pleistosen, berdasarkan korelasi dengan formasi Dahor dilembar Tewah (Sumintadipura, 1976). Tebal formasi ini diperkirakan 300 m yang diendapkan dilingkungan paralik.
- b. Formasi Kuayan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Utara. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Kuayan ini terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batu pasir tufaan dan tuf. Formasi ini tidak dapat ditentukan umurnya, tetapi di Kalimantan Barat, Van Emmichoven (1939) op. Cit. Margono U, dkk (1995) menemukan fosil di formasi ini berumur Trias.
- c. Formasi Mentaya terletak disekitar Kota Kuala Kuayan. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Mentaya ini dibagian bawah

didominasi oleh batu pasir sedangkan dibagian atas batu pasir arkosa berbutir halus-kasar, terdapat struktur silang siur (*cross bedding*) dan gelembur gelombang. Setempat terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung yang kadang-kadang mengandung batubara. Formasi ini diendapkan pada kala Eosen-Oligosen dalam lingkungan pengendapan litoral, setempat berupa rawa-rawa.

- d. Formasi Pembuang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di sekitar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Pembuang ini terdiri dari batupasir karbonan (*carbonaceous sandstone*), konglomerat (*conglomerate*), batu lanau (*siltstone*), batu lempung (*claystone*) dan gambut (*peat*).
- e. Endapan aluvial, tersusun oleh endapan delta (*deltaic deposit*) dan endapan klastika tak terpisahkan (*undifferentiated clastic deposit*). Endapan delta terdiri dari pasir kasar-halus (*coarse to fine grained sands*), lanau (*silt*) dan lumpur (*mud*). Sedangkan endapan klastika tak terpisahkan terdiri dari pasir (*sand*), lanau (*silt*), lempung (*clay*) dan gambut (*peat*). Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah struktur sesar/patahan (*fault*) dan kekar (*join*). Struktur patahan dapat memicu terjadinya bencana alam geologi. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain batubara, bijih besi, emas primer (dengan asosiasi mineral perak dan atau mineral tembaga timah hitam atau seng), emas sekunder, kwarsa kristal (termasuk kecubung atau amethyst), bentonit, kaolin, pasir kwarsa, granit, basalt, gambut, dan tanah liat.

Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari berbagai macam batuan, endapan, dan di beberapa bagian terdapat sesar. Struktur geologi tersebut mengakibatkan wilayah ini memiliki cukup banyak potensi bahan galian tambang yang dapat dimanfaatkan, baik bahan galian A, B, maupun C. Bahan-bahan galian yang banyak terdapat di wilayah ini meliputi batubara, air raksa, emas, kaolin, bijih besi, pasir kwarsa, granit, gambut, bauksit, dan lain-lain. Potensi bahan galian ini tersebar hampir di seluruh wilayah.

### **2.1.6 Hidrologi**

Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai.

Dalam Wilayah Kotawaringin Timur terdapat sungai besar yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Beberapa sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, *speed boat*, dan *long boat*. Sungai besar tersebut antara lain yaitu : Sungai Mentaya, Sungai Cempaga, Sungai Tualan, Sungai Kuayan, Sungai Kalang, Sungai Sampit, Sungai Lenggana, Sungai Mentobar, Sungai Seranau, dan Sungai Penyahuan. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan.

Selain air sungai, penduduk juga memanfaatkan air danau, rawa-rawa, dan air tanah untuk keperluan sehari-hari.

**Tabel 1.2**  
**Data Beberapa Sungai Besar di Kabupaten**  
**Kotawaringin Timur**

No.	Nama Sungai	Panjang(km)	Panjang yang dapat daliri (km)	Kedalaman (km)	Lebar (m)
1.	Mentaya	400	270	6	400
2.	Cempaga	42	38	6	250
3.	Sampit	46	40	6	200
4.	Kuayan	48	40	6	200
5.	Kalang	18	18	3	200
6.	Seranau	21	21	3	200

Sumber: RTRW Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur, 2001

Sebaran danau paling banyak di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu. Danau tersebut sebenarnya merupakan bekas alur sungai lama yang saat ini telah berpindah alirannya. Di wilayah Kecamatan Telaga Antang terdapat sebuah bendungan yang dibangun dengan memanfaatkan topografi dan pola aliran sungai di sekitarnya, yaitu Bendungan Tanjung Harapan.

### 2.1.7 Tutupan Lahan

Tutupan lahan sedikit memberi gambaran pola penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun tidak serinci klasifikasi penggunaan lahan, jenis tutupan lahan bisa menggambarkan pola, sebaran, dan luas dari masing-masing jenis tersebut. Berdasarkan data tutupan lahan dari Kementerian Kehutanan tahun 2013 hasil interpretasi citra satelit, diperoleh informasi bahwa tutupan lahan terbesar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perkebunan dengan prosentase 27,9% dari luas wilayah kabupaten, diikuti dengan semak belukar 18,7%.

**Tabel 1.3**  
**Luas Tutupan Lahan Tahun 2013**

Jenis Tutupan Lahan Luas (ha)	Luas (ha)
Hutan Lahan Kering Primer	504,5
Hutan Lahan Kering Sekunder	255484,4
Hutan Mangrove Primer	441,5
Hutan Mangrove Sekunder	1058,5
Hutan Rawa Sekunder	138198,2
Hutan Tanaman	560,6
Lahan Terbuka	40090,8
Perkebunan	434351,2
Permukiman	6389,5
Pertambangan	9337,4
Pertanian Lahan Kering	7445,9
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	53067,3
Rawa	56915,7
Sawah	43497,5
Semak Belukar	290424,7
Semak Belukar Rawa	181539,4
Tambak	67,5
Transmigrasi	24405,0
Tubuh air-Danau	10536,1

## 2.2 Potensi Bencana dan Daerah Rawan Bencana

Potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan sejarah kejadian bencana adalah kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrim, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, dan banjir namun tidak menutup

kemungkinan bencana lain dapat terjadi berdasarkan faktor-faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan bencana, termasuk potensi bencana yang dapat terjadi pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur. Daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi ini antara lain Kecamatan Mentaya Hulu karena pada daerah ini terdapat struktur sesar/patahan. Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kalimantan Tengah tahun 2016-2020, keseluruhan potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 8 (delapan) bencana seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Data Potensi Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Data Kajian Resiko Bencana Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020**

Kab/Kota	Kecamatana	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (HA)	Kelas
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Selatan	Cuaca Ekstrim	20,999	Sedang
	Mentaya Hilir Selatan	Epidemi dan wabah penyakit	307	Rendah
	Mentaya Hilir Selatan	Gempa Bumi	20,999	Rendah
	Mentaya Hilir Selatan	Kekeringan	20,999	Sedang
	Teluk Sampit	Cuaca Ekstrim	58,868	Sedang
	Teluk Sampit	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1,176	Sedang
	Teluk Sampit	Gempa Bumi	59,02	Rendah
	Teluk Sampit	Kekeringan	59,094	Sedang
	Pulau Hanaut	Cuaca Ekstrim	52,822	Sedang
	Pulau Hanaut	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	411	Sedang
	Pulau Hanaut	Gempa Bumi	52,838	Rendah
	Pulau Hanaut	Kekeringan	52,838	Sedang

	Mentawa Baru Ketapang	Cuaca Ekstrim	34,553	Sedang
	Mentawa Baru Ketapang	Epidemi dan wabah penyakit	2,540	Rendah
	Mentawa Baru Ketapang	Gempa Bumi	34,553	Rendah
	Mentawa Baru Ketapang	Kekeringan	34,553	Sedang
	Seranau	Cuaca Ekstrim	69.771	Sedang
	Seranau	Epidemi dan wabah penyakit	119	Rendah
	Seranau	Gempa Bumi	69.771	Rendah
	Seranau	Kebakaran Hutan dan Lahan	64,522	Sedang
	Mentaya Hilir Utara	Cuaca Ekstrim	71,108	Sedang
	Mentaya Hilir Utara	Gempa Bumi	71,108	Rendah
	Mentaya Hilir Utara	Kekeringan	71,108	Sedang
	Kota Besi	Banjir	60,127	Sedang
	Kota Besi	Cuaca Ekstrim	60,699	Sedang
	Kota Besi	Gempa Bumi	60,886	Rendah
	Telawang	Banjir	106,810	Sedang
	Telawang	Cuaca Ekstrim	110,042	Sedang
	Telawang	Gempa Bumi	110,042	Rendah
	Telawang	Kebakaran Hutan dan Lahan	85,687	Sedang
	Telawang	Epidemi dan wabah penyakit	413	Rendah
	Baamang	Banjir	47,898	Sedang
	Baamang	Cuaca Ekstrim	48,235	Sedang
	Baamang	Epidemi dan wabah penyakit	2,991	Rendah
	Baamang	Gempa Bumi	48,235	Rendah
	Cempaga	Cuaca Ekstrim	84,833	Sedang

	Cempaga	Epidemi dan wabah penyakit	1	Rendah
	Cempaga	Gempa Bumi	84,833	Rendah
	Cempaga Hulu	Banjir	166,716	Sedang
	Cempaga Hulu	Cuaca Ekstrim	172,669	Sedang
	Cempaga Hulu	Epidemi dan wabah penyakit	326	Rendah
	Cempaga Hulu	Gempa Bumi	172,719	Rendah
	Cempaga Hulu	Kebakaran Hutan dan Lahan	151,680	Sedang
	Cempaga Hulu	Tanah Longsor	2	Sedang
	Parenggean	Banjir	62,637	Sedang
	Parenggean	Cuaca Ekstrim	64,426	Sedang
	Parenggean	Gempa Bumi	64,604	Rendah
	Parenggean	Kebakaran Hutan dan Lahan	35,464	Sedang
	Tualan Hulu	Banjir	79,976	Rendah
	Tualan Hulu	Cuaca Ekstrim	87,608	Sedang
	Tualan Hulu	Gempa Bumi	92,173	Rendah
	Tualan Hulu	Kebakaran Hutan dan Lahan	72,476	Sedang
	Tanah Longsor	Tanah Longsor	204	Sedang
	Mentaya Hulu	Banjir	123,882	Sedang
	Mentaya Hulu	Cuaca Ekstrim	132,109	Sedang
	Mentaya Hulu	Gempa Bumi	137,685	Rendah
	Mentaya Hulu	Kebakaran Hutan dan Lahan	108,694	Sedang
	Mentaya Hulu	Tanah Longsor	96	Sedang
	Bukit Santuai	Banjir	57,699	Rendah
	Bukit Santuai	Cuaca Ekstrim	96,948	Sedang
	Bukit Santuai	Epidemi dan wabah penyakit	625	Rendah
	Bukit Santuai	Gempa Bumi	178,521	Rendah

	Bukit Santuai	Kebakaran Hutan dan Lahan	176,471	Sedang
	Bukit Santuai	Tanah Longsor	52,231	Sedang
	Antang Kalang	Banjir	53,287	Rendah
	Antang Kalang	Cuaca Ekstrim	63,517	Sedang
	Antang Kalang	Epidemi dan wabah penyakit	218	Rendah
	Antang Kalang	Gempa Bumi	145,335	Rendah
	Antang Kalang	Kebakaran Hutan dan Lahan	137,345	Sedang
	Antang Kalang	Tanah Longsor	15,068	Sedang
	Telaga Antang	Banjir	59,446	Rendah
	Telaga Antang	Cuaca Ekstrim	81,415	Sedang
	Telaga Antang	Gempa Bumi	168,540	Rendah
	Telaga Antang	Kebakaran Hutan dan Lahan	153,360	Sedang
	Telaga Antang	Tanah Longsor	36,576	Sedang

*Sumber Data : BPBD Prop.Kalteng 2016-2020*

Sedangkan untuk data rawan bencana berdasarkan Data Kajian Resiko Bencana Kalimantan Tengah terangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 1.5**  
**Data Rawan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan Data Kajian Resiko Bencana Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020**

Kab/Kota	Kecamatan	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (HA)	Kelas
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Selatan	Banjir	20,954	Tinggi
	Mentaya Hilir Selatan	Kebakaran dan Lahan Hutan	7,983	Tinggi
	Teluk Sampit	Banjir	58,764	Tinggi
	Teluk Sampit	Kebakaran dan Lahan Hutan	40,039	Tinggi
	Pulau Hanaut	Banjir	52,554	Tinggi
	Pulau Hanaut	Kebakaran dan Lahan Hutan	35,762	Tinggi
	Mentawa Baru Ketapang	Banjir	34,386	Tinggi
	Mentawa Baru Ketapang	Kebakaran dan Lahan Hutan	18,544	Tinggi
	Seranau	Banjir	69,475	Tinggi
	Seranau	Kekeringan	69,771	Tinggi
	Mentaya Hilir Utara	Banjir	70,669	Tinggi
	Mentaya Hilir Utara	Kebakaran dan Lahan Hutan	43,432	Tinggi
	Kota Besi	Kebakaran dan Lahan Hutan	34,847	Tinggi
	Kota Besi	Kekeringan	60,886	Tinggi
	Telawang	Kekeringan	110,042	Tinggi
	Baamang	Kebakaran dan Lahan Hutan	36,354	Tinggi
	Baamang	Kekeringan	48,235	Tinggi
	Cempaga	Banjir	83,880	Tinggi
	Cempaga	Kebakaran dan Lahan Hutan	77,102	Tinggi

	Cempaga	Kekeringan	84,833	Tinggi
	Cempaga Hulu	Kekeringan	172,719	Tinggi
	Parenggean	Kekeringan	64,604	Tinggi
	Tualan Hulu	Kekeringan	52,173	Tinggi
	Mentaya Hulu	Kekeringan	137,685	Tinggi
	Bukit Santuai	Kekeringan	178,521	Tinggi
	Antang Kalang	Kekeringan	145,336	Tinggi
	Telaga Antang	Kekeringan	168,540	Tinggi
	Telaga Antang	Epidemi dan wabah penyakit	799	Tinggi

*Sumber Data : BPBD Prop.Kalteng 2016-2020*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bencana yang perlu diwaspadai dan berpotensi tinggi adalah bencana banjir, bencana kekeringan, bencana kebakaran hutan dan lahan dan bencana epidemi dan wabah penyakit.

Untuk memudahkan indentifikasi ancaman bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan serta memudahkan untuk melakukan pemantauan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada kondisi tertentu, maka telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/35/HUK-BPBD/2018 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (*terlampir*). Surat Keputusan ini telah menetapkan 51 desa yang berpotensi tinggi bencana kebakaran hutan dan lahan.

### **2.3 Data Kejadian Bencana Tahun 2019**

Selama tahun 2019 beberapa kejadian bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliungan abrasi. Rincian kejadian bencana di tahun 2019 sebagai berikut :

## A. Banjir

Kejadian banjir selama mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

1. Di bulan Pebuari 2019 : Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur, berdasarkan hasil survey banjir sebagai berikut :

- Kronologis kejadian : Pemukiman masyarakat Desa Umbar Mandiri treletak dipinggir Sungai Ubar anak sungai Cempaga, sejak tanggal 7 Februari 2019 malam hujan lebat sehingga menyebabkan jalan utama terendam banjir di lima lokasi, dan menyebabkan air naik denan ketinggian 1-1,5 meter atas tanah dan terendam air rumah penduduk di 5 RT, yaitu RT 1 dan RT 2 (30 KK), RT. 3 (25 KK), RT.4 (34 KK), RT 5 (25 KK) total 105 KK dengan ketinggian 30-50 cm diatas lantai, namun pada tanggal 8 Februari 2019 hujan turun lagi, sehingga bertambah rumah yang terendam sebanyak 10 KK sehingga total menjadi 115 KK. Saat survey 9 Feruari 2019 jam 10.15 air mulai surut hingga jam 14.25 turun + 30 cm
- Tindakan :
  - Pemetaan udara, pendokumentasi, pendataan daerah banjir, identifikasi kerugian, jumlah rumah terendam
  - Pendataan warga yang sakit
  - Pelayanan kesehatan berkolaborasi dengan petugas kesehatan Piskemas Pundu kepada warga yang sakit berupa pemeriksaan diagnostik dan pemberian obat-obatan, yaitu sebanyak 15 orang (kasus Stoke, ISPA, Gastritis, Dermatitis, Hipertensi)

- Menganjurkan masyarakat mengungsi ke rumah keluarganya yang berada di dataran tinggi
- Warga meninggikan memasang papan dan meletakkan barang lebih tinggi.
- Penyuluhan PB Banjir dan menjalin informasi selama banjir dengan BPBD dan warga.
- Berkoordinasi dengan PT Gunajaya Binatama Agro (BGA) dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat berupa : beras (400 kg), Sarden (160 kaleng), minyak goreng (80 liter), gula pasir (80 kg), Kopi (50 bungkus), teh (30 bungkus) diserahkan oleh perwakilan PT BGA melalui Kepala Desa Ubar Mandiri (Bombi 0813.5190.1984) disaksikan RT dan warga.

## 2. Bulan Juni 2019 :

- a. Banjir di wilayah relokasi desa Ujung Pandaran kecamatan Teluk Sampit. Terdampak 60 KK, ketinggian air + 50 cm diatas lantai, akses jalan terhambat. Akibat curah hujan yang tinggi
  - Tindakan :
    - Evakuasi / mengungsi ke rumah tetangga / keluarga.
- b. Banjir di desa Barunang Miri kecamatan Parenggean, ketinggian air di atas jalan raya desa + 30 cm . Belum ada keluhan masyarakat. Akses jalan terhambat. Belum ada rumah yang masuk air. '
- c. Banjir meluapnya sungai Tualan, ketinggian air diatas jalan raya 25 cm. Belum ada korban yg terdampak.
- d. Banjir di desa Tumbang Mujam

- e. Banjir di Tualan Hulu .
- f. Banjir di desa Bajarau Kecamatan Parenggean, lokasi yang terdampak banjir di desa Bajarau Jalan Padas ketinggian +70 cm, akses jalan terhambat, pemukiman berada di teoiu sungai Tualan. Desa Bajarau rumah terendan 1 buah an. Ny. Siya (51 tahun, Ibu rumah tangga)
- g. Banjir desa Hanjalipan, Jalan induk desa terendam setinggi + 50 cm, fasilitas yang tergenang sekolah dasar, rumah penduduk. Rumah penduduk belum ada yang masuk air. Banjir akibat hujan lebat hampir setiap hari.
- Tindakan :
    - Memberikan himbauan kepada penduduk agar anak kecil jangan bermain disekitar area banjir DAS Bajarau. Sumbangan dana Rp. 500.000,- untuk warga yang terdampak.
    - Koordinasi Kades dan Camat setempat wilayah banjir untuk memantau kondisi banjir setiap hari pagi – siang dan sore di lokasi kejadian
    - Memantau dan mengidentifikasi penyebab banjir,,: curah hujan, kondisi letak bangunan, saluran air, debit air, akses jalan, ketinggian air di atas jalan, kletinggian air diatas rumah, jumlah rumah yang terdampak, fasilitas umum.
    - Merencanakan survey kembali ke wilayah utara yang dilaporkan banjir

Untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019 tidak ada laporan banjir.

## **B. Kebakaran Hutan dan Lahan**

Penetapan kasus siaga dan status tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

1. **Siaga Darurat** Bencana Karhutla Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dimulai pada tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019 ( 120 hari).
2. **Tanggap Darurat** Bencana Karhutla dimulai tanggal 16 September sampai dengan 30 Oktober 2019 ( 45 hari ).
3. **Transisi Darurat ke Pemulihan** Bencana Karhutla mulai tanggal 8 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2019.

Data kejadian kebakaran hutan dan lahan per 31 Desember 2019 sebanyak **247 kejadian** tersebar di 17 ( tujuh belas) kecamatan dengan luas lahan terbakar melalui peta udara dan drone sebanyak 2052,66 Ha. Kejadian Karhutla terbanyak di Kecamatan Cempaga **30 kejadian**, Kecamatan Seranau sebanyak 23 kejadian, Kecamatan Mentawa Baru sebanyak **23 kejadian**. Dari **247 kejadian** Karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak **197 kejadian** dapat ditangani.

Data kejadian Karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.6**  
**Pemetaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**( Periode Juli sampai dengan Oktober 2019)**

NO	KECAMATAN	LUAS TERBAKAR	PERENTASE (%)	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH PENANGANAN KEJADIAN	KETERANGAN	
1	TELUK SAMPIT	177,1	8,63	12	11	WILAYAH SELATAN	
2	MH.SELATAN	101,84	4,96	11	9		
3	MH UTARA	133,67	6,51	16	14		
4	PULAU HANAUT	217,91	10,62	11	10	51%	
5	MB.KETAPANG	414,79	20,21	23	23	1045,31	
6	SERANAU	150,76	7,34	23	21	WILAYAH TENGAH	
7	BAAMANG	172,03	8,38	21	16		
8	KOTA BESI	98,54	4,8	18	15		
9	TELAWANG	75,98	3,7	11	8		
10	CEMPAGA	104,52	5,09	30	21		
11	CEMPAGA HULU	24,98	1,22	14	7		31%
12	PARENGGEAN	89,05	4,34	12	6	625,81%	
13	MENTAYA HULU	81,17	3,95	12	10	WILAYAH UTARA	
14	TUALAN HULU	100,43	4,89	10	8		
15	BUKIT SANTUAI	40,61	1,96	7	5		
16	TELAGA ANTANG	22,93	1,17	7	6		18%
17	ANTANG KALANG	45,35	2,21	9	7		380,54
<b>TOTAL</b>		<b>2052,66</b>	<b>100</b>	<b>247</b>	<b>197</b>	<b>2052,66</b>	
<b>PERSENTASE</b>					<b>79,76</b>	100	

Sumber data : Bidang Darlog BPBD Kab.Kotim Tahun 2019

Catatan :

1. Sebaran asap terbesar berada di wilayah selatan Kab.Kotim.
2. Angin bertiup rata-rata dari tenggara menuju barat laut dan dar selatan menuju utara.
3. Sebagian besar kejadian kebakaran berada pada lahan masyarakat
4. Jumlah Penanganan dihitung berdasarkan jumlah kejadian yang ditangani posko darat dan Water Booming.

- Upaya-upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
  - Pemadaman, pendinginan dan pencegahan perluasan daerah terbakar yang potensi asapnya mengganggu pemukiman penduduk, dikoordinir Posko Penanganan Karhutla Kotim, di 247 kejadian dan 197 kejadian yang ditangani (luasan kebakaran terukur 2.052,66 Ha). Pemadaman udara dari dari satgas darat di wilayah dilakukan pemadaman mulai bulan Agustus 2019 sebanyak 106 kali.
  - Penyediaan air bersih untuk wilayah kekeringan bekerja sama dengan PDAM disalurkan kepada masyarakat di 4 (empat) kecamatan : Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut dan Teluk Sampit sebanyak 330 liter.
  - Pembentukan dan pelatihan Masyarakat Peduli Api ( MPA) pada 17 kecamatan sebagai garda terdepan untuk upaya pencegahan, kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana Karhutla.
  - Pembentukan desa/kelurahan Tangguh Bencana (Destana) baik itu untuk bencana karhutla ataupun bencana banjir.
  - Pembuatan sumur-sumur bor penanganan karhutla di daerah-daerah dengan riwayat kejadian karhutla dengan kategori rawan. Saat ini yang sudah berfungsi ada 11 buah dan yang sedang dibuat sejumlah 22 sumur bor penanganan karhutla.
  - Pembangunan Pos Karhutla Desa pada titik-titik rawan terjadinya karhutla.

### **C. Angin Puting Beliung**

Kejadian angin puting beliung terjadi pada tahun 2018. Data kejadian angin puting beliung sebanyak 5 (lima) kejadian di bulan Desember

2018 dan terjadi di kecamatan Mentaya Hilir Selatan, kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang. Atas kejadian ini dilaporkan 2 (dua) unit bangunan yaitu bangunan pasar Pelangian roboh dan atap bangunan Balai Desa Pelalang berterbangan diterjang angin puting beliung.

#### **D. Abrasi**

Kejadian abrasi terjadi pada tahun 2018. Data kejadian abrasi di pantai Ujung Pandaran terjadi pada bulan Mei 2018 sepanjang 3.142 km dan menyebabkan jalan dan fasilitas umum di objek wisata pantai Ujung Pandaran rusak berat.

### **3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**
  - a. Pembangunan gedung kantor
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pengadaan mebeleur
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - g. Pemeliharaan tin/berkala peralatan gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :**
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :**
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana :**
  - a. Pembentukan Desa Tangguh
- 6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran :**
  - a. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
- 7. Program Mitigasi Bencana :**
  - a. Mitigasi Bencana
- 8. Program Tanggap Darurat:**
  - a. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana /Gladi Posko Penanggulangan Bencana
  - b. Monitoring dan Evaluasi Keadaan Darurat Bencana
  - c. Operasional Tanggap Darurat
- 9. Program Logistik dan Peralatan**
  - a. Pengelolaan Logistik dan Peralatan
  - b. Penyediaan Buffer Stock Logistik

## **10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Daerah Pasca Bencana

## **11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan**

- a. Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
- b. Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran (DBH-DR)
- c. Pelatihan/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
- d. Sosialisasi dan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
- e. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Kunjungan Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH-DR)
- f. Pos Komando Siaga dan Tanggap Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
- g. Penaksiran Kerugian Pasca Kebakaran (DBH-DR)
- h. Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) (DBH-DR)
- i. Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya (DBH-DR)

### **1.4. Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi**

#### **1. Kepegawaian**

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

##### **a. Jumlah Pegawai**

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 38 orang, terdiri

dari 18 orang PNS (47,38 %) , dan 20 orang Tenaga Honor Kontrak Daerah (52,63 %).

**Tabel. 1.7**

**Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur**

<b>Sekretariat</b>	<b>Bidang Pencegahan &amp; Kesiapsiagaan</b>	<b>Bidang Kedaruratan &amp; Logistik</b>	<b>Bidang Rehabilitasi &amp; Rekonstruksi</b>
- 1 Kepala Pelaksana - 1 Sekretaris - 3 Kasubag - 2 Staf PNS - 13 tenaga kontrak	- 1 Kepala Bidang - 2 Kepala Seksi - 1 staf - 2 tenaga kontrak	- 1 Kepala Bidang - 2 Kepala Seksi - 1 Staf - 4 tenaga kontrak	- 1 Kepala Bidang - 2 Kepala Seksi - 1 tenaga kontrak
<b>20 Orang</b>	<b>6 Orang</b>	<b>8 Orang</b>	<b>4 Orang</b>

**b. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang ditamatkandari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Magister (S2) : 3 Orang atau (16,7 %)
- b. Pendidikan Sajana (S1) : 10 Orang atau (55,6 %)
- c. Pendidikan Sarjana Muda : 2 Orang atau (11,1 %)
- d. Pendidikan SLTA : 2 Orang (11,1 %)
- e. Pendidikan SLTP : 1 Orang (5,56 %)
- f. Pendidikan SD : - Orang

**2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja**

BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur menempati gedung milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tahun 2013, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km 6,8 Sampit. Sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi :

**Tabel.1.8****Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur**

<b>No.</b>	<b>JENIS ASET</b>	<b>LUAS / JUMLAH</b>
1.	Bangunan	
2.	Water Treament	3 buah
	Mini Bus Penumpang	1 buah
	Pick up	6 buah
	Mobil Pemadam Kebakaran	1 buah
	Mobil Tangki	4 buah
	Sepeda motor	13 buah
	scoter	4 buah
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	18 buah
	Gerobak Tarik	1 buah
	Gerobak Barang	1 buah
	Suver Boat	2 buah
	Alat angkut apung bermotor khusus	2 buah
	GPS	5 buah
	AC	11 buah
	Chain Saw	7 buah
	Mesin Ketik Elektronik	1 buah
	Lemari besi	3 buah
	Rak besi	2 buah
	Filling besi	23 buah
	Brankas	1 buah
	White Board	5 buah
	Mesin Absensi	1 buah
	Tempat Tidur besi	20 buah
	Meja Rapat	6 buah
	Kursi putar	9 buah
	Kursi rapat	60 buah

	tenda	5 buah
	Sofa	1 buah
	TV	3 buah
	Kursi teras	4 buah
	Lemari Es	1 buah
	Kipas angin	11 buah
	Dispenser	6 buah
	Tandon air	26 buah
	Alat pompa portable	19 buah
	PC unit komputer	13 buah
	Laptop	19 buah
	Note book	3 buah

*Sumber : Inventaris Barang 2019*

### **3. Anggaran**

Anggaran belanja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 adalah adalah Rp 5.287.632.850,-. Kemudian pada anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 16.918.607.850,-. Anggaran ini mengalami kenaikan karena ada dana DBH- DR (Dana Bagi Hasil- Dana Reboisasi) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 11.300.000.000,-.

Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri atas gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp. 2.061.863.950,-

b. Belanja Langsung

Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.14.856.743.900 ,- untuk membiayai 11 program dan 37 kegiatan.

**Tabel. 1.9**  
**Anggaran Perprogram dan Perbelanja**

No	Program	Anggaran	Belanja Pegawai	Belanja Modal	Belanja barang dan Jasa
1.	Belanja Tidak Langsung	2.061.863.950,-	2.061.863.950,-	-	-
2.	Belanja Langsung	14.856.743.900,-	172.740.000,-	5.048.248.400,-	9.635.755.500,-

#### 4. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;

9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.
11. Belum memadainya kualitas ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana;
12. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.

## **5. Isu Strategis**

Isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah yaitu :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB );
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;

8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.
9. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program CSR baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana.
10. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagi korban terdampak
11. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Yogyakarta dalam menyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITASKINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjajian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP.**

Pada bab ini di uraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Pada bab ini akan digambarkan secara singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021 dan berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing PD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019.

#### **2.1 Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Gambaran dan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, termuat dalam visi dan misi Badan maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Oleh sebab itu di

tetapkanlah Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

### **2.1.1 Visi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah merumuskan visinya untuk periode lima tahun (2016 - 2021) sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS,  
MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA  
RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA”.***

### **2.1.2 Misi**

Misi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai penjabaran yang lebih konkret untuk mendukung terwujudnya visi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021 berada pada misi ke 2 (dua) yaitu : ***“Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan”.*** Upaya-upaya yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkandung dalam misi tersebut sebagai berikut :

1. Mempersiapkan masyarakat dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana;
2. Pencegahan/mitigasi & kesiapsiagaan, tanggap darurat & logistik Menggerakkan masyarakat dalam upaya penanganan Bencana yang lebih bermutu bernuansa serta rehabilitasi & rekonstruksi penanggulangan bencana.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan bencana yang bermutu, merata dan terjangkau secara professional;
4. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaran penanganan bencana;
5. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana;

### 2.1.2 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kewaspadaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
  2. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh melalui Peningkatan Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana secara Efektif dan Efisien serta Ketepatan Dalam Pengerahan Peralatan, Pemberian Bantuan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  3. Mewujudkan Pemulihan Infrastruktur dan Sosial Ekonomi Akibat Bencana
- Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Uraian Tujuan dan Indikator Tujuan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>TARGET</b>
Mewujudkan Kewaspadaan dan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana	Menurunnya Resiko Bencana Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kesiapsiagaan Bagi Seluruh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten kotawaringin Timur	100%
Terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh melalui Peningkatan Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana secara Efektif dan Efisien serta Ketepatan Dalam Pengerahan Peralatan, Pemberian Bantuan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif dan Dukungan Logistik Serta Peralatan Untuk Penanganan Penanggulangan Bencana Yang Lebih Baik	100%
Mewujudkan Pemulihan Infrastruktur dan Sosial Ekonomi Akibat Bencana	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Yang Lebih Baik Dari Sebelum Terjadi Bencana	100%

### 2.1.3 Sasaran

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada menyusun rencana kerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu lima tahun diukur dengan indikator sasaran dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel. 2.2**  
**Uraian Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	100%
Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	100%
Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	100%

#### **2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2016-2021**

Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dielaborasi ke dalam upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan BPBD yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021.

Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi kedua (mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ).

#### **2.1.4.1 Strategi**

Strategi menjelaskan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta menjelaskan pernyataan-pernyataan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan peran serta aparatur, masyarakat, dunia usaha,dll dalam usaha penanggulangan bencana;
2. Peningkatan partisipasi relawan;
3. Penguatan data potensi bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana;
4. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi, simulasi, dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana.;
5. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
6. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
7. Peningkatan kapasitas TRC;
8. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda;
9. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
10. Pengkajian secara akurat indentifikasi kerugian dan kerusakan akibat dampak bencana;
11. Melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Akibat Bencana;

#### **2.1.4.2 Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi lima tahun kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berkualitas kepada masyarakat ;
2. Pembentukan relawan/satgas dari kelompok masyarakat ;
3. Peningkatan Kinerja SDM aparatur yang berkualitas dan profesional serta pemenuhan akan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana ;
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
5. Penetapan Status Darurat Bencana ;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas TRC ;
7. Pembentukan posko bencana ;
8. Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda ;
9. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
10. melakukan kajian dan identifikasi kerugian pasca bencana ;
11. Merehabilitasi dan Merekonstruksi Infrastruktur Akibat Bencana

#### **2.1.5 Pengukuran Pencapaian Sasaran**

Pengukuran sasaran strategis BPBD Kabupaten Kotawaringim Timur didasarkan pada indikator sasaran strategis dengan formulasi sebagai berikut :

**Tabel. 2.3**

### Formulasi Indikator Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	Jumlah desa tangguh terbentuk di daerah rawan bencana <i>dibagi</i> jumlah desa dirawan bencana <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Desa yang Mampu dan Tanggap dalam Penanggulangan Bencana	100%
Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	Jumlah kasus bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap <i>dibagi</i> jumlah kasus bencana <i>dikali</i> 100	Meningkatnya Penanganan Kejadian Saat Tanggap Darurat	100%
Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	Jumlah objek terdampak yang ditangani <i>dibagi</i> jumlah keseluruhan objek terdampak <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tepat Waktu	100%

Data-data yang dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dijabarkan pada tabel berikut

Tabel. 2.4

Sumber Data Perhitungan Indikator Sasaran

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	INDIKATOR PROGRAM	SUMBER DATA
Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	Jumlah desa tangguh terbentuk di daerah rawan bencana <i>dibagi</i> jumlah desa rawan bencana <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Desa yang Mampu dan Tanggap dalam Penanggulangan Bencana	- Jumlah desa tangguh yang direncanakan
			- Jumlah desa tangguh yang terbentuk
Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	Jumlah kasus bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap <i>dibagi</i> jumlah kasus bencana <i>dikali</i> 100	Meningkatnya Penanganan Kejadian Saat Tanggap Darurat	- Jumlah kejadian bencana
			- Jumlah kejadian bencana yang tertangani
			- Sarana dan prasarana yang digunakan
			- Jumlah personil yang diturunkan
Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	Jumlah objek terdampak yang ditangani <i>dibagi</i> jumlah keseluruhan objek terdampak <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tepat Waktu	- Jumlah permohonan bantuan

## 2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada Tahun 2019 dan indikator keberhasilan pencapaiannya maka telah ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah tertuang dalam rencana kerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahun 2019 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2019. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019.

**Tabel 2.5**  
**PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

No	SASARAN	DIDUKUNG JUMLAH PROGRAM
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	2
2	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	2
3	Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	1
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Program Pencegahan dini Dan Penanggulangan Bencana	168.705.000,-	APBD
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	4.890.621.400,-	DBH-DR
<b>Total Anggaran</b>			<b>5.059.326.400</b>	
2.	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Program Tanggap Darurat	5.480.400,-	APBD
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6.062.183.000,-	DBH-DR
<b>Total Anggaran</b>			<b>6.067.663.400,-</b>	
3.	Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	214.000.000,-	APBD
<b>Total Anggaran</b>			<b>214.000.000,-</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>11.340.989.800,-</b>	

Pada tabel diatas, jumlah anggaran terbesar untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif yaitu **53,50 %** dari total anggaran seluruhnya. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana yaitu sebesar **44,61 %**. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana sebesar **1,89 %** dari total anggaran seluruhnya.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RENSTRA dan IKU BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	100%
Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	100%
Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	100%



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA BPBD**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019**

**3.1 Capaian Kinerja BPBD**

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Tahun 2019 dengan realisasinya. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Pada tahun anggaran 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan 3 (empat) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menganalisa 3 (tiga) indikator kinerja.

Uraian Capaian kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut :

**3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019**

<b><i>SASARAN 1.</i></b>
<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana</b>
<b><i>INDIKATOR KINERJA</i></b>
<b>Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk</b>

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui 2 (dua) yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penanggulangan Bencana
2. Pembentukan Desa Tangguh
3. Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
5. Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
6. Pelatihan / Pembekalan/Inhouse Training / Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (DBH-DR)

Jumlah anggaran seluruhnya untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2019 sebesar **Rp. 5.059.326.400,-** dengan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp. 4.741.348.949,-** atau **( 93,71%)** . Adapun capaian sasaran ini dapat dilihat dalam **tabel 3.1** sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Pencapaian Sasaran 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	%
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	100	100	
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>100</b>

Indikator program pertama yaitu persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang mewakili kegiatan pencegahan bahaya bencana alam atau pada fase pra bencana. Keluaran hasil pada kegiatan ini adalah terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana sebagai hasil dari kesadaran masyarakat akan ancaman rencana yang dapat timbul pada wilayahnya sehingga perlu diberikan wawasan, skill serta sarana dan prasarana untuk mewujudkan sebuah desa/kelurahan yang tangguh dalam menghadapi bencana. Tangguh

dalam arti mampu beradaptasi, mampu mengantisipasi dan cepat pulih setelah bencana terjadi. Formulasi perhitungan indikator program pertama adalah :

$$\frac{\text{Jumlah desa tangguh yang terbentuk di daerah rawan bencana}}{\text{Jumlah desa rawan bencana}} \times 100$$

Realisasi indikator program pertama pada tahun 2019 adalah 100 % yang diperoleh dari :

$$\frac{2 \text{ desa tangguh yang terbentuk}}{2 \text{ desa tangguh yang direncanakan}} \times 100$$

Pada proses pembentukan desa tangguh dilakukan antara lain dengan bimbingan teknis fasilitator desa tangguh, rapat koordinasi fasilitasi PRB, pengembangan desa tangguh dan pemberian bantuan peralatan untuk menunjang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pembentukan desa tangguh Tahun 2019 menunjukkan hasil kinerja **yang memuaskan** dan dapat terealisasi 100 % artinya 2 (tiga ) desa tangguh yang direncanakan terbentuk dapat dilaksanakan yaitu **Desa Terantang Kecamatan Seranau dan Desa Bajarau Kecamatan Parenggean sebagai desa tangguh banjir.**

Capaian indikator program pertama ini pada tahun 2019 adalah 100 %. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana dalam kurun waktu 2016-2019 telah terbentuk 17 desa / kelurahan tangguh bencana dan terealisasi sesuai dengan target, dan diperoleh capaian 100 %. Dan pada tahun 2020 akan kembali direncanakan pembentukan desa tangguh di 2 (dua) desa yaitu desa Tumbang Mujam Kecamatan Tualan Hulu dan desa Sungai Ubar Kecamatan Cempaga Hulu.

Selain Pembentukan desa/kelurahan tangguh, juga telah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 34 MPA yang terdiri dari 132 desa yang tersebar di 168 desa dan 17 kelurahan. Pembentukan dan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada 17 kecamatan sebagai garda terdepan untuk upaya pencegahan, kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana Karhutla.

<b><i>SASARAN 2.</i></b>
<b>Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif</b>
<b><i>INDIKATOR KINERJA</i></b>
<b>Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana</b>

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui 2 (dua ) yaitu Program Tanggap Darurat, dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan Evaluasi Keadaan Darurat Bencana
2. Pos Komando Siaga dan Tanggap Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
3. Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya (DBH-DR)

Sedangkan jumlah anggaran untuk kegiatan yang terkait dalam Sasaran 2 pada Tahun 2019 sebesar **Rp. 6.067.663.400,-** dengan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp. 4.457.649.378,-** atau **(73,46 %)**.

Adapun capaian sasaran ini dapat dilihat dalam **tabel 3.2** sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Pencapaian Sasaran 2**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	100	80,91	
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>80,91</b>

Tingkat waktu tanggap ( Responsive Time Rate) adalah pelayanan bencana pada saat tanggap darurat yang efektif, bereaksi cepat dan tepat, tiba di lokasi kejadian bencana untuk mengurangi resiko bencana dengan waktu minimal , dimulai disaat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian, yang langsung melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat waktu tanggap ( Responsive Time Rate) adalah rasio antara kejadian bencana yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit tingkat waktu tanggap bencana dan tidak lebih 60 menit tingkat waktu tanggap bencana di kawasan diluar jangkauan wilayah manajemen bencana.

Formulasi perhitungan indikator program kedua adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kasus bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus bencana}} \times 100$$

#### A. Bencana banjir

Pada tahun 2019 terjadi banjir 9 (sembilan) kejadian yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian adalah 9 (sembilan) kejadian sehingga :

$$\frac{9 \text{ kejadian banjir yang tertangani}}{9 \text{ kejadian banjir}} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Dengan demikian tingkat waktu tanggap ( respon time rate) kejadian bencana banjir telah tercapai 100 % hal ini dilihat dari 9 (sembilan ) kejadian dapat tertangani semua.

## B. Bencana kebakaran hutan dan lahan

Data kejadian kebakaran hutan dan lahan per 31 Desember 2019 sebanyak 247 kejadian tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dengan luas lahan terbakar melalui peta udara dan drone sebanyak 2052,66 Ha.

Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian adalah 197 kejadian kebakaran hutan dan lahan sehingga :

**197 kejadian karhutla yang tertangani**

**x 100**

**247 kejadian karhutla**

**= 79,76 %**

Sedangkan jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian bencana yang lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian sebanyak 50 kejadian.

Hal ini disebabkan kendala dan permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber air di lokasi-lokasi yang terjadi karhutla semakin sulit sedangkan anak sungai maupun parit serta drainase dan lokasi penampung air yang ada sudah relatif surut dan tak berarti waktu dan jarak tempuh untuk mengambil airpun semakin jauh.
2. Kondisi tanah gambut yang kering membuat api menjalar di dalam tanah. Api menjadi semakin sulit diprediksi kemunculannya dan kebakaran lahan yang sudah dipadamkan dapat muncul kembali di sekitar area tersebut pada 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelahnya.
3. Arah angin sering kali menjauhkan tim pemadam dari sumber api. Ketika api bergerak ke daerah yang tidak memiliki akses darat, di sinilah satgas udara dibutuhkan untuk melakukan water booming untuk mencegah perluasan api.
4. Keterbatasan peralatan, sulitnya menjangkau lokasi dan kurangnya sumber air.

5. Musim kemarau selain mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan juga berimbas pada kekeringan dan kesulitan air terutama di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

**C. Bencana angin puting beliung**

Kejadian angin puting beliung tidak pernah terjadi di tahun 2019 hanya terjadi di tahun 2018. Data kejadian angin puting beliung sebanyak 5 (lima) kejadian di bulan Desember 2018 dan terjadi di kecamatan Mentaya Hilir Selatan, kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang.

Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian adalah 5 (lima) kejadian sehingga :

$$\frac{5 \text{ kejadian yang tertangani}}{5 \text{ kejadian}} \times 100 = 100 \%$$

**D. Bencana abrasi pantai**

Kejadian abrasi pantai tidak pernah terjadi di tahun 2019, dan hanya terjadi pada tahun 2018.

Abrasi pantai Ujung Pandaran terjadi pada bulan Mei 2018 sepanjang 3.142 km dan menyebabkan jalan dan fasilitas umum di objek wisata pantai Ujung Pandaran rusak berat.

Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian adalah 1 (satu) kejadian sehingga :

$$\frac{1 \text{ kejadian yang tertangani}}{1 \text{ kejadian}} \times 100 = 100 \%$$

Dengan demikian sudah memenuhi target yang ingin dicapai yaitu 100 %, berarti tidak ada kesenjangan  $100\% - 100\% = 0\%$

Secara umum Tingkat waktu tanggap ( Responsive Time Rate) untuk bencana yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dari bencana banjir, bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana angin puting beliung dan bencana abrasi pantai adalah sebagai berikut :

<b>Jumlah kasus bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap</b>	<b>x</b>	<b>100</b>
<hr/>		
<b>Jumlah kasus bencana</b>		
<b>212 kasus bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap</b>	<b>x</b>	<b>100</b>
<hr/>		
<b>262 Jumlah kasus bencana</b>		

**= 80,91 %**

Sedangkan jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian bencana yang lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian sebanyak 50 kejadian. Dengan demikian berarti masih ada sedikit kesenjangan  $100\% - 80,91\% = 19,01\%$ .

Walaupun target yang ditetapkan yaitu 100 % tidak terpenuhi, namun bisa menunjukkan keberhasilan BPBD Kab. Kotawaringin Timur dalam mengatasi bencana yang terjadi, karena lebih dari 80 % bencana dapat ditangani.

<b><i>SASARAN 3.</i></b>
<b>Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana</b>
<b><i>INDIKATOR KINERJA</i></b>
<b>Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana</b>

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui 1 (satu) yaitu Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Rehabilitasi dan rekontruksi bidang prasarana fisik di daerah pasca bencana

Sedangkan jumlah anggaran untuk kegiatan yang terkait dalam Sasaran 3 pada Tahun 2019 sebesar **Rp. 214.000.000,-** dengan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp. 211.506.000,-** atau ( **98,83 %**).

Adapun capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.3**  
**Pencapaian Sasaran 3**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	100	100	
<b>Capaian Rata-Rata</b>				<b>100</b>

Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana bisa dilihat antara lain dari perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan

resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Realisasi kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mencapai 100 % . Aspek penting untuk mencapai persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana juga bisa dilihat dari koordinasi peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana. Kecilnya anggaran pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menyebabkan pada tahun 2019 ini difokuskan pada penyelesaian pembangunan rehabilitasi dan rekontruksi jalan desa di 1 (satu) desa yaitu desa Sudan di Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur yang rusak pasca bencana.

Secara garis besar rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	1. Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	%	100	100
2.	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	2. Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	%	100	80,91
3.	Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	3. Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	%	100	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>93,63</b>

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dan 2019 dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

#### **Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dan 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	100%	100%	79,09	80,91
Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	100%	100%	100%	100%

Bila dilihat dari gambaran tabel tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana dengan indikator sasaran prosentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dari tahun 2018 dan tahun 2019 telah mencapai target.

Selama tahun 2015-2019 telah terbentuk 17 desa tangguh bencana yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur . Adapun desa tangguh tersebut antara lain :

- Tahun 2015 telah dibentuk 2 (dua) desa tangguh yaitu desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ( desa tangguh kebakaran) dan desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi (desa tangguh Banjir).
  - Tahun 2016 telah dibentuk 2 (dua ) desa tangguh yaitu desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara (desa tangguh kebakaran) dan desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu (desa tangguh banjir).
  - Tahun 2017 telah dibentuk 4 (empat) desa tangguh yaitu Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit ( Tangguh Kebakaran), Desa Kandan Kecamatan Kota Besi (Desa Tangguh Kebakaran ) , Desa Tanjung Jariangau ( Desa Tangguh Banjir) dan desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit (desa tangguh banjir)
  - Tahun 2018 telah terbentuk juga 3 (tiga) desa tangguh yaitu di desa Ganepo Kecamatan Seranau (Desa tangguh kebakaran), di desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang ( Desa tangguh Kebakaran) dan desa Tumbang Tilap Kecamatan Bukit Santuai ( Desa Tangguh Banjir).
  - Tahun 2019 telah terbentuk juga 2 (dua) desa tangguh yaitu di desa Terantang Kecamatan Seranau (Desa tangguh kebakaran) dan desa Bajarau Kecamatan Parenggean ( Desa Tangguh Banjir).
2. Sasaran meningkatnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif dengan indikator sasaran Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 dan pencapaian kinerja telah sudah baik walaupun tidak sepenuhnya mencapai target. Penilaian capaian kinerja indikator ini tertuang didalam matrik casceding BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biokrasi.
  3. Sasaran meningkatnya pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana dengan indikator sasaran Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana baik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah mecapai target. Di

tahun 2018 ada 2 (dua ) desa dan di tahun 2019 ada 1 (satu) desa dilaksanakan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi fisik pasca bencana.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra 2016-2021 dijabarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 3.6**  
**Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 dengan target jangka menengah Renstra 2016-2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH						REALISASI KINERJA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	<b>80,91 %</b>
Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>

Terkait pembentukan desa tangguh dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 realisasi tercapai 100 % sesuai dengan target dan telah terbentuk 17 (delapan) desa tangguh. Diharapkan dengan dana yang terbatas untuk tahun 2020 sampai dengan berakhirnya RENSTRA tahun 2021 pembentukan desa tangguh dapat terealisasikan.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 , realisasi pencapaian sasaran penanganan kedaruratan bencana yang efektif belum ada. Dikarenakan sasaran strategis ini dilakukan penilaian kinerjanya baru pada tahun 2018 setelah perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam matrik casceding. Penilaian pencapaian kinerja didasari indikator tingkat waktu tanggap ( responsive time rate) dimulai disaat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian, yang langsung melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda. Sebagaimana dalam tabel realisasi kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana yang bisa ditangani mengalami kenaikan dari tahun 2018 walaupun belum sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana nilai capaian sebesar 80,91 %. sudah menunjukkan penanganan bencana sudah berhasil ditangani, diharapkan untuk tahun selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan seiring dengan peningkatan sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai.

Untuk sasaran meningkatnya pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah sesuai target yaitu terealisasikan 100 % dengan total desa yang telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reonstruksi adalah 14 desa, dengan rincian di tahun 2016 ada 8 (delapan) desa, tahun 2017 ada 3 (tiga) desa, di tahun 2018 ada 2 (dua) desa dan di tahun 2019 ada 1 (satu) desa.

#### **3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja BPBD Kotawaringin Timur tahun 2019 untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK/07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan dan Reboisasi.
- c. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 44 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
- e. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
- f. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
- f. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

- a. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana;
- c. Kebiasaan masyarakat yang selalu tergantung dengan bantuan pemerintah ketika terjadi bencana.
- d. Faktor alam yang menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berdampak kebakaran hutan dan lahan dimana disertai cuaca yang kekeringanr.
- e. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas.
- f. Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kulitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Melalui program pemerintah pusat, membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui forum pengurangan risiko bencana;
- b. Memfasilitasi pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana merupakan sarana edukasi bagi masyarakat untuk memetakan potensi bencana di wilayahnya, membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- c. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam evakuasi dan assesment awal bencana;
- d. Memfasilitasi Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
- e. Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama-sama masyarakat maupun swasta.
- f. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana kepada pelajar dan anak usia dini (PAUD)

### **3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 38 orang pegawai ( 18 orang PNS, 22 orang Tenaga honorer) yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil tersebut, dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur juga dibantu oleh satuan tugas dan relawan yaitu Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Pusdalops membantu tugas BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat terjadi bencana yaitu melakukan assesment awal dan evakuasi. Dengan sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Kotawaringin masih memerlukan personil sebanyak 10 (sepuluh) orang

tenaga teknis dan pada tahun 2020 baru terpenuhi 4 (empat) orang, hal ini karena terbatasnya anggaran yang tersedia. Selain itu, perlu adanya peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya penambahan personil dan peningkatan SDM diharapkan penanganan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin meningkat.

## 2. Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2018 sampai dengan 2019 menggunakan anggaran dari DBH-DR yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sarana dan prasarana ini sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

## 3.2 Analisis Anggaran

Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2019. Namun karena terbatasnya anggaran yang disediakan melalui APBD Kabupaten kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RENJA dilaksanakan dengan dana yang terbatas bahkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Selain anggaran yang terdapat dalam DPA juga digunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat darurat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggaran BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2019 adalah, sebesar **Rp 16.918.607.850,-**, terealisasi sebesar **Rp. 14.283.034.976,-** atau pencapaian **84,42 %**, dengan rincian belanja :

- a. Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.061.683.950,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.732.236.181,-** atau **84,01 %**.
- b. Belanja Langsung sebesar **Rp. 14.856.743.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 12.550.798.785,-** atau **84,48 %** yang dijabarkan melalui 11 Program 37 kegiatan.

Pada realisasi belanja langsung tersebut, jumlah anggaran terbesar untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif yaitu sebesar **Rp. 6.067.663.400,-** atau **40,84 %** dari total anggaran Belanja Langsung dengan realisasi anggaran **Rp. 4.457.649.378,-** atau **73,46 %**. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana yaitu sebesar **Rp. 5.059.326.400,-** atau **34,05 %** dengan realisasi **Rp. 4.741.348.949,-** atau **93,71 %** . Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana sebesar **Rp. 214.000.000,-** atau **1,44 %** dari total anggaran seluruhnya dengan realisasi sebesar **Rp. 211.506.000,-** atau **98,83 %**

Anggaran dan realisasi belanja langsung urusan Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel. 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis dan Program Pendukung Tahun 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Program Pencegahan dini Dan Penanggulangan Bencana	168.705.000,-	165.305.000,-atau 97,98 %
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	4.890.621.400,-	4.576.043.949,- atau 87,76 %
<b>Total Anggaran</b>			<b>5.059.326.400,-</b>	<b>4.741.348.949, - atau 93,71 %</b>
2.	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Program Tanggap Darurat	5.480.400,-	5.160.400,- atau 94,16 %
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6.062.183.000,-	1.957.325.000 atau 43,12 %
<b>Total Anggaran</b>			<b>6.067.663.400,-</b>	<b>4.457.649.378, atau 73,46 %</b>
3.	Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	214.000.000,-	211. 506.000,-atau 93,83 %
<b>Total Anggaran</b>			<b>214.000.000,-</b>	<b>211. 506.000,-atau 93,83 %</b>
<b>Total Anggaran Seluruhnya</b>			<b>11.340.989.800,-</b>	<b>9.410.504.327 atau 82,98 %</b>



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas disampaikan sebagai berikut : diawali memilah isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut melalui pengukuran capaian kinerja. Analisis capaian kinerja maupun akuntabilitas keuangan BPBD. Setelah dilaksanakan analisis tersebut maka kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai kinerja dengan hasil yang beragam disebabkan oleh beberapa kendala.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur , yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 3 (tiga) sasaran didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur yang tertuang dalam matrik cascading dan telah disepakai oleh Kementerian Pendayaguna Aparatur dan Reformasi Biokrasi. Dari 3 ( tiga) yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang

berhasil dilaksanakan dengan memuaskan ( 100% ). Sedangkan 1 (satu) sasaran lainnya cukup baik dilaksanakan yaitu 80,91 %.

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar **93,63 %** dan pencapaian keuangan sebesar **82,98 %** maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan kinerja yang **memuaskan** sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan namun tetap perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya semangat dan etos kerja dari pegawai.
2. Adanya antusiasme masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana
3. Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Dibalik keberhasilan dalam pencapaian kinerja, BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengalami beberapa hambatan, yaitu:

1. SDM yang belum mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Sarana dan prasarana belum memadai
3. Koordinasi antar instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana belum optimal

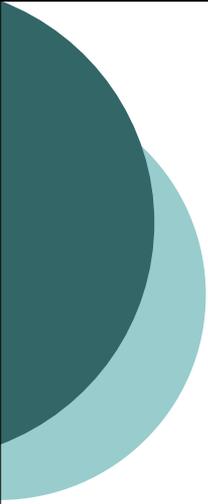
#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Terhadap kondisi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik di masa akan datang adalah :

1. Mempertajam penyusunan rencana biaya/anggaran melalui RKA/RKT dan DPA dengan melibatkan semua bidang di PD terkait.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM agar sesuai dengan kompetensi personil yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana melalui pelatihan dan sertifikasi kebencanaan.
3. Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana terus diusulkan baik melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten disesuaikan dengan tingkat kerusakan.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Demikian LKIP ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.



**AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

---

**LAMPIRAN**

**CONTOH MATRIK CASCADING / PENJABARAN KINERJA**

Instansi : Kabupaten Kotawaringin Timur  
 SOPD : Dinas / Badan  
 Visi : .....  
 Tahun : 2017 - 2021

NO	MISI SOPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tim Perbaikan SAKIP Kab. Kotim,

Tim Verifikasi Menpan,

Kepala Dinas / Badan,

.....

.....

Nama .....  
 NIP. ....

**MATRIK CASCADING /PENJABARAN KINERJA**

**Instansi** : Kabupaten Kotawaringin Timur  
**SOPD** : BPBD  
**Visi** : Terwujudnya masyarakat yang madani dan berdaya saing dalam suasana religius, kebersamaan, aman dan sejahtera  
**Tahun** : 2017 - 2021

NO	MISI SOPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggul daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan Kewaspadaan dan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana	Menurunnya Resiko Bencana Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kesiapsiagaan Bagi Seluruh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten kotawaringin Timur	1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	1. Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana.	Berkurangnya Ancaman dan Kerentanan Bencana	Meningkatnya Desa yang Mampu dan Tanggap dalam Penanggulangan Bencana	Pembentukan Desa Tangguh	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	Terbentuknya Desa Tangguh di Daerah rawan Bencana
						Program Mitigasi Bencana	Tersusunnya Data Base Kawasan dan Masyarakat Rawan Bencana	Meningkatnya Kecamatan dan Desa yang Terpetakan Potensi Bencananya	Pemetaan dan Pembentukan Profil daerah Rawan Bencana	Tersedianya Peta Rawan Bencana	Jumlah Peta Rawan Bencana yang terselesaikan
		Terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh melalui Peningkatan Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana secara Efektif dan Efisien serta Ketepatan Dalam Pengerahan Peralatan, Pemberian Bantuan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif dan Dukungan Logistik Serta Peralatan Untuk Penanganan Penanggulangan Bencana Yang Lebih Baik	2. Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	1. Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	Program Tanggap Darurat	Meningkatnya Pengerahan Sumber Daya dan Logistik Pada Saat Tanggap Darurat yang Sesuai Kebutuhan	Meningkatnya Penanganan Kejadian Saat Tanggap Darurat	1. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana /Pelatihan TRC	Terpenuhinya Kebutuhan TRC Penanganan Bencana	Terbentuknya Sumber Daya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih

										2.	Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana /Gladi posko Penanggulangan Bencana	Meningkatnya koordinasi dan keterampilan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana (Kebakaran, Banjir)	Jumlah personil Posko Bencana yang terbentuk
										3.	Operasional Tanggap Darurat	Tertanganinya Kejadian Kebencanaan Secara Cepat dan Akurat	Jumlah data/laporan kondisi lokasi bencana yang tertangani
										4.	Pengelolaan Logistik Dan Peralatan	Meningkatnya relawan yang handal dalam pengelolaan logistik dan peralatan	Jumlah relawan yang handal dalam pengelolaan logistik dan peralatan
		Mewujudkan Pemulihan Infrastruktur dan Sosial Ekonomi Akibat Bencana	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Yang Lebih Baik Dari Sebelum Terjadi Bencana	3	Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	1	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tercapainya Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Meningkatnya Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tepat Waktu	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Daerah Pasca Bencana	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Pasca Bencana	Jumlah Paket Prasarana Fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terselesaikan

Tim Perbaikan SAKIP Kab. Kotim,

Tim Verifikasi Menpan,

Kepala Pelaksana,

**H. Imam Subekti,S.Pt.,MM**  
NIP.197109051996031004

**Anesia Ribka**  
NIP. 198911062014032001

**Ir. M. Yusuf, MT**  
NIP. 19640914 199603 1 003

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan Kewaspadaan dan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana	Menurunnya Resiko Bencana Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kesiapsiagaan Bagi Seluruh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten kotawaringin Timur
Terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh melalui Peningkatan Sistem Penanganan Kedaruratan Bencana secara Efektif dan Efisien serta Ketepatan Dalam Pengerahan Peralatan, Pemberian Bantuan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif dan Dukungan Logistik Serta Peralatan Untuk Penanganan Penanggulangan Bencana Yang Lebih Baik
Mewujudkan Pemulihan Infrastruktur dan Sosial Ekonomi Akibat Bencana	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana Yang Lebih Baik Dari Sebelum Terjadi Bencana

TARGET
100%
100%
100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	100%
Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	100%
Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	100%

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	Jumlah desa tangguh terbentuk di daerah rawan bencana <i>dibagi</i> jumlah desa dirawan bencana <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Desa yang Mampu dan Tanggap dalam Penanggulangan Bencana	100%
Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	Jumlah kasus bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap <i>dibagi</i> jumlah kasus bencana <i>dikali</i> 100	Meningkatnya Penanganan Kejadian Saat Tanggap Darurat	100%
Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	Jumlah objek terdampak yang ditangani <i>dibagi</i> jumlah keseluruhan objek terdampak <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tepat Waktu	100%

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	INDIKATOR PROGRAM	SUMBER DATA
Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	Jumlah desa tangguh terbentuk di daerah rawan bencana <i>dibagi</i> jumlah desa rawan bencana <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Desa yang Mampu dan Tanggap dalam Penanggulangan Bencana	- Jumlah desa tangguh yang direncanakan
			- Jumlah desa tangguh yang terbentuk
Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	Jumlah kasus bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap <i>dibagi</i> jumlah kasus bencana <i>dikali</i> 100	Meningkatnya Penanganan Kejadian Saat Tanggap Darurat	- Jumlah kejadian bencana
			- Jumlah kejadian bencana yang tertangani
			- Sarana dan prasarana yang digunakan
			- Jumlah personil yang diturunkan
Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	Jumlah objek terdampak yang ditangani <i>dibagi</i> jumlah keseluruhan objek terdampak <i>dikalikan</i> 100	Meningkatnya Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tepat Waktu	- Jumlah permohonan bantuan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2017		TAHU
		TARGET	REALISASI	TARGET
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk	100%	100%	100%
Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif	Tingkat waktu tanggap (responsivetime rate ) saat penanganan bencana	.-	.-	100%
Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana	Prosentase Pemulihan/Penanganan Sarana Dan Prasarana Akibat Bencana	100%	100%	100%

<b>N 2018</b>
<b>REALISASI</b>
100%
79,09
100%

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

TAHUN : 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	DANA (Rp)
1	2		3	4	5
	<b>BELANJA</b>				<b>16.918.607.850</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>2.061.863.950</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>14.856.743.900</b>
	<b>Meningkat kan Pelayanan Adminis trasi Perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>	<b>Kualitas pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia dalam mutu/waktu yang dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.518.461.684</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kantor/alamat yang terlayani pertahun	1400 Lembar	6.300.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun	4 Rekening	85.200.000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rasio adiministrasi keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	41 Orang	646.439.424
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan	25 Jenis Barang	40.939.930
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun	45 jenis barang	42.082.330
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	136840 Lembar	22.780.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang cukup	170 Buah	10.440.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan dan undang-undang	180 Eks/Bulan/Media	27.830.000
		Penyediaan makanan dan minuman	Rasio bidang yang dilengkapi makan minum yang memadai	12 Bulan	37.950.000

		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	105 Kali	399.650.000
		Rapat - rapat koordinasi di dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	102 kali	198.850.000
	<b>Meningkatnya Sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kualitas pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia dalam mutu/waktu yang dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.375.180.448</b>
		Pembangunan Gedung Kantor	Rasio aparatur yang dapat di tampung gedung kantor	1 unit	725.441.800
		Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Rasio gedung kantor yang mendapat perlengkapan yang memadai	4 jenis barang	113.525.000
		Pengadaan peralatan gedung Kantor	Rasio gedung kantor yang mendapat peralatan yang memadai	3 jenis barang	89.782.000
		Pengadaan Meubeleir	Rasio kecukupan meubeleir	1 unit	4.380.000
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rasio gedung kantor yang berkondisi layak	5 Unit Gedung Kantor	94.134.600
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional	Rasio kendaraan dinas yang berkondisi layak	1 tahun	309.847.048
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Rasio perlengkapan yang berkondisi layak	12 Bulan	7.800.000
		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Kondisi Peralatan gedung kantor tetap baik	23 unit	30.270.000
	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>Program peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat kedisiplinan ASN dalam mengenakan seragam</b>	<b>100%</b>	<b>61.575.000</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah atribut pakaian dinas beserta perlengkapannya tercukupi	45 buah	4.200.000
		Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Tersedianya pakaian batik dan olah raga	45 stell	57.375.000
	<b>Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>4.500.000</b>
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang berkompentensi terpenuhi	15 orang	4.500.000

	<b>Meningkatkan penyebaran Informasi kebencanaan kepada</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Penyebarluasan Infomasi tentang kebencanaan</b>		<b>23.000.000</b>
		Ekspo Sampit	Tersedianya informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat	1 kegiatan	23.000.000
	<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana.</b>	<b>Jumlah Desa Tangguh yg Terbentuk</b>	<b>3 desa</b>	<b>168.705.000</b>
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penanggulangan Bencana	Tersedianya WEB kebencanaan sebagai informasi tentang kebencanaan di Kab. Kotim	150 orang	68.705.000
		Pembentukan desa tangguh.	Jumlah Desa tangguh terbentuk di 17 kecamatan	3 desa	100.000.000
	<b>Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Efektif</b>	<b>Program Tanggap Darurat</b>	<b>Prosentase Kejadian Saat Tanggap Darurat yang ditangani</b>	<b>32 orang</b>	<b>5.480.400</b>
		Monitoring Evaluasi Keadaan Darurat Bencana	Jumlah data/laporan kondisi lokasi bencana	1 laporan	5.480.400
	<b>Meningkatnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana</b>	<b>Progrom Rehabilitasi dan rekonstruksi</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang dipulihkan akibat bencana</b>	<b>3 paket</b>	<b>344.300.000</b>
		Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Daerah Pasca Bencana	Jumlah Paket rehab/rekon prasarana fisik pasca bencana	2 kegiatan	344.300.000
		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</b>	<b>Prosentase Penurunan Kasus Kebakaran Hutan</b>		<b>11.300.000.000</b>
		Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Terlaksananya Kegiatan Penyadartahuan kepada Masyarakat	100%	204.209.700
		Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran (DBH-DR)	Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	100%	3.823.700.000
		Pelatihan/Pembekalan /Inhouse/Training/ Penyegaran/ Bimtek Pengendalian Kebakaran dan Hutan (DBH-DR)	Terlaksananya kegiatan Pelatihan/pembekalan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	100%	437.987.200

	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Kunjungan Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH-DR)	Terlaksananya koordinasi dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana	100%	187.195.000
	Penetapan Pos Komando Siaga dan Tanggap Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Beroperasinya Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	100%	3.253.843.000
	Penaksiran Kerugian Pasca Kebakaran (DBH-DR)	Data kerusakan dan kerugian akibat bencana yang lebih akurat	100%	160.000.000
	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (DBH-DR)	Terbentuknya 17 MPA di Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	100%	424.724.500
	Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya (DBH-DR)	Terlaksananya Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	100%	2.808.340.000

# PHOTO KEGIATAN

## POSKO SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2019



# PHOTO KEGIATAN POSKO SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## TAHUN 2019



# KEGIATAN POSKO KARHUTLA KAB KOTIM TAHUN 2019

LOGO

